

**POLA REKRUTMEN PARTAI POLITIK TERHADAP CALON
LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM
PERIODE 2004-2009 KE DPRD SUMATERA BARAT
(Studi Kasus: DPW PKS dan DPW PBB SUMBAR)**

Artikel

Nama : Indrayadi
No.Bp : 1021202108
Tempat Kerja : PT. Dharmapena Citra Media
**Alamat : Jln.Sagu No.6, Kebagusan Raya,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan**
Alamat Email : indrayadi_ok@yahoo.com



**POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2013**

**POLA REKRUTMEN PARTAI POLITIK TERHADAP CALON
LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM
PERIODE 2004-2009 KE DPRD SUMATERA BARAT
(Studi Kasus: DPW PKS dan DPW PBB SUMBAR)**

Oleh : Indrayadi

Di bawah Bimbingan Dr. Sri Zul Chairiyah, M.A dan Dra.Mira Elfina, M.Si

ABSTRAK

Pada Pemilu 2004, jumlah perempuan sebagai calon legislatif dari PKS Sumbar yang maju untuk DPRD Sumbar adalah sebanyak 26 orang dari 60 calon legislatif atau sebanyak 43,33 persen. Jumlah calon legislatif perempuan PBB Sumbar adalah 7 orang dari 32 orang atau sebanyak 21,87 persen, namun perempuan yang berhasil lolos menjadi anggota DPRD Sumbar periode 2004-2009 dari DPW PBB sebanyak 2 orang dari 5 Anggota DPRD Sumbar dari PBB. Sedangkan dari DPW PKS tidak seorangpun perempuan yang menjadi Anggota DPRD Sumbar, walau pada periode ini terdapat 7 orang menjadi Anggota DPRD Sumbar dari PKS dan semuanya laki-laki.

Untuk mengetahui pola rekrutmen PKS dan PBB pada Pemilu 2004, penulis menggunakan teori rekrutmen Alan Ware yang mengemukakan bahwa dalam melakukan rekrutmen politik, pada umumnya terdapat lima cara dalam prosedur seleksi untuk calon anggota legislatif untuk mengarahkan seleksi kepada sistem yang lebih demokratis.

Pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian bertempat di Sumatera Barat dan didukung berbagai data dari Kantor Pusat Partai Bulan Bintang di Jakarta. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan informan terpilih dengan teknik penarikan informan yang digunakan adalah teknik snowball.

Hasil temuan penelitian membuktikan bahwa pola rekrutmen yang dilakukan oleh PKS Sumbar pada Pemilu 2004 dilakukan dengan pola patron-klien dan nepotisme, dimana yang menjadi caleg adalah teman dekat dan istri. Pola rekrutmen PBB Sumbar dilakukan dengan pola klik, dimana faktor satu OKP asal antara Tim KAPPU, Ketua DPW PBB dan calon legislatif, mempengaruhi posisi nomor urut pada Pemilu 2004.

Kata Kunci : Rekrutmen, PKS, PBB

ABSTRACT

In the 2004 elections, the number of women as candidates who advanced to Regional Parliament of West Sumatera are as many as 26 people from as many as 60 candidates or 43,33 percent. Number of women candidates of PBB West Sumatera is 7 of 32 people or as many as 21,87 percent, but women of The PBB who managed to become a members of regional parliament of West Sumatera 2004-2009 period as 2 out of 5 members of the PBB of West Sumatera. While none of the PKS women who become Members of Regional Parliament of West Sumatra, although during this period there were 7 people into Regional Parliament of West Sumatra members of the PKS.

To that end, please note that the recruitment pattern applied to the PKS and the PBB in the 2004 elections. The author uses the theory of recruitment Alan Ware is suggested that in the political recruitment, in general, there are five ways in the selection procedure for legislative candidates to direct the selection to a more democratic system.

Approach to the research method used is a qualitative. The research took place in West Sumatra and supported a variety of data from the PBB office in Jakarta. Data used to support this research is in-depth interviews with selected informants with informants withdrawal technique used was snowball technique .

These research findings demonstrate that the pattern of recruitment conducted by PKS in the 2004 elections conducted by the patron - client pattern and nepotism , which is a candidate was a close friend and wife . PBB recruitment patterns done with click patterns , where the factor the origin organization between KAPPU team, chairman of DPW PBB and candidates, affect the position of the serial number in the 2004 elections .

Keywords : Recruitment, PKS, PBB

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara demokrasi, Pemilu adalah keniscayaan yang menjadi syarat minimum bagi suatu negara jika ingin dikatakan sebagai negara demokrasi. Seperti juga di negara demokrasi lainnya, Pemilu Indonesia dilandasi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur, adil (jurdil).

Berdasarkan ketentuan yang ada di Indonesia, Pemilu legislatif diikuti oleh partai politik yang terdaftar dalam Komisi Pemilihan Umum

(KPU), dimana partai politik adalah

organisasi politik yang

menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus.

Partai politik merekomendasikan nama-nama calon legislatifnya pada masyarakat untuk di pilih, namun sebelum menentukan nomor urut caleg tersebut, partai terlebih dahulu melakukan rekrutmen, namun berbagai permasalahan pun muncul dalam proses rekrutmen tersebut.

Permasalahan rekrutmen, terjadi karena prosedur rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak

memiliki aturan baku dalam menentukan nomor urut calegnya. Di sinilah terjadi berbagai permasalahan dan ketidakadilan terhadap pola yang dilakukan oleh partai politik, terkhususnya bagi kader perempuan.

Permasalahan ketidakadilan terhadap perempuan ini, tidak lepas dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. Nomor urut 1 dan 2 pada sebagian besar partai politik masih tetap diduduki laki-laki, sedangkan perempuan ditempatkan pada nomor-nomor akhir. Salah satu kajian yang menarik adalah pemberdayaan politik perempuan yang dilakukan oleh DPW PKS dan DPW PBB Sumatera Barat, khususnya pada Pemilu 2004.

Namun yang menjadikan permasalahannya ialah, ketika PKS Sumbar mampu mengantarkan 7 orang kadernya ke DPRD Sumbar, tapi tidak terdapat seorangpun

perempuan. Sedangkan PBB Sumbar mampu mengantarkan 5 orang kadernya, dan 2 orang diantaranya adalah perempuan.

Pada Pemilu 2004 jumlah caleg PKS Sumbar sebanyak 60 orang, dimana caleg laki-laki berjumlah 34 orang atau 56,66 persen dan caleg perempuan sebanyak 26 orang atau 43,33 persen. Dengan demikian PKS Sumbar telah melampaui kuota minimal caleg perempuan, namun realitanya, DPW PKS tidak menempatkan kader perempuannya pada nomor urut jadi, yaitu 1 dan 2. Sedangkan caleg PBB Sumbar sebanyak 32 orang, dimana caleg laki-laki berjumlah 25 orang atau 78,13 persen dan caleg perempuan sebanyak 7 orang atau 21,87 persen, namun PBB berhasil mengantarkan sebanyak 5 orang kadernya, dan 2 diantaranya perempuan, yaitu Salmiati dan Rusda Khairati.

B. Rumusan Masalah

Tidak terpilihnya caleg perempuan PKS di DPRD Sumbar pada Pemilu legislatif 2004-2009 dan terpilihnya 2 caleg perempuan PBB menjadi awal ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian, mengingat kedua partai ini sama-sama berasaskan Islam dan sama-sama partai modern, namun memiliki pandangan berbeda dalam penempatan kadernya dalam lembaga legislatif. Permasalahan ini semakin menarik, karena pada tahun 2003, keluar UU No. 12 tahun 2003

pasal 65, bahwa partai politik hendaknya mempertimbangkan penempatan sekurang-kurangnya 30 persen caleg perempuan dari daftar caleg yang diajukan. Tapi ternyata hal ini tidak menempatkan jumlah perempuan di DPRD Sumbar pada Pemilu periode 2004-2009 meningkatkan dibandingkan Pemilu legislatif sebelumnya.

Perbandingan serta penempatan nomor urut antara laki-laki dengan perempuan DPW PKS dan DPW PBB dapat kita lihat dari masing-masing daerah pemilihan berikut:

Tabel 1. Perbandingan jumlah Caleg laki-laki dengan perempuan serta nomor urutnya antara PKS Sumbar dengan PBB Sumbar

Daerah Pemilihan	Nama Partai	No. Urut Caleg		Total Caleg	No. Caleg yang terpilih
		Laki-Laki	Perempuan		
Sumbar I (Padang, Kep.Mentawai)	PKS	1,2,4,5,6,7,9	3,8,10,11	11	1,2 (laki-laki)
	PBB	1,2,5,6	3,4,7	7	1 (laki-laki)
Sumbar 2 (Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan dan Kota Solok)	PKS	1,2,3,5,6,10	4,7,8,9,11,12	12	1 (laki-laki)
	PBB	2,3,5	1,4	5	1 (perempuan)
Sumbar 3 (Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, Tanah Datar,	PKS	1,2,3,4,6,9,11	5,7,8	11	1 (laki-laki)
	PBB	2,3,4,5	1	5	1 (perempuan)

Padang Panjang)					
Sumbar 4 (Padang Pariaman, Pariaman, Agam, Bukittinggi)	PKS	1,2,4,5,7,11, 12	3,6,8,9,10,13	13	1,2 (laki- laki)
	PBB	1,2,3,4,6,7,8, ,9	5	9	1 (laki- laki)
Sumbar 5 (Payakumbuh, 50 Kota, Pasaman, Pasaman Barat)	PKS	1,2,3,4,6,8,1 2	5,7,9,10,11,13	13	1 (laki- laki)
	PBB	1,2,3,4,5,6	-	6	1 (laki- laki)

Penempatan nomor urut bagi perempuan dalam pencalegan antara DPW PKS Sumbar dengan DPW PBB Sumbar pada Pemilu periode 2004-2009 memiliki perbedaan. Peneliti berasumsi, bahwa terjadi permasalahan pemahaman rekrutmen politik terhadap caleg perempuan di DPW PKS Sumbar dengan DPW PBB Sumbar, walau pun jumlah caleg perempuan PKS Sumbartelah mencapai 43,33 persen, dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dibandingkan partai lainnya, namun tidak seorangpun perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD Sumbar. Peneliti membatasi penelitian ini pada mekanisme partai, pandangan dan sikap politik

pimpinan DPW PKS dan DPW PBB terhadap hak-hak politik perempuan di Sumbar, khususnya perekrutan caleg perempuan pada Pemilu periode 2004-2009, sehingga terjadi penempatan nomor urut seperti Pemilu 2004 di Sumbar. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pola rekrutmen yang diterapkan oleh DPW PKS Sumatera Barat dan DPW PBB Sumatera Barat terhadap bakal caleg perempuan pada Pemilu periode 2004 – 2009?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis

pola rekrutmen yang diterapkan oleh DPW PKS Sumatera Barat dan DPW PBB Sumatera Barat terutama terhadap bakal caleg perempuan pada Pemilu 2004.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan melakukan analisa lebih mendalam. Unit analisa dalam penelitian dalam penelitian ini adalah DPW PKS dan DPW PBB Sumatera Barat sebagai sebuah institusi.

Penelitian ini berlokasi di Sumatera Barat, hal ini dikarenakan ketertarikan peneliti dengan data-data awal yang peneliti dapatkan saat melakukan observasi lapangan.

Unit analisis merupakan unit sosial yang digunakan oleh peneliti di dalam mengukur sebuah variable, unit analisis merupakan satuan yang

akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan unit analisis institusi, yaitu institusi partai politik yang menjadi objek utama penelitian, yaitu DPW PKS Sumbar dan DPW PBB Sumbar.

Teknik penarikan informan yang digunakan adalah teknik snowball. Teknik snowball dimulai dari informan awal untuk menunjukan orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjukan orang lain yang dapat memberikan informasi begitu seterusnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data maupun yang diperoleh, dari wawancara mendalam (In-depth Interview). Teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengeksplorasi

data diri informan yang bersifat nilai, makna dan pemahaman yang tidak mungkin dilakukan dengan teknik survey.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

PEMBAHASAN

A. Rekrutmen Calon Legislatif

Perempuan oleh DPW PKS

Sumbar Pada Pemilu 2004

1. Perekrutan Caleg Legislatif PKS

a) Tim Penokohan dan Pencalegan Kader (TPPK) PKS Sumbar Untuk mengorganisir kemenangan PKS, pengurus DPP,

DPW dan DPD PKS terlebih dahulu membentuk sebuah tim pemenang partai, tim ini disebut dengan nama Tim Penokohan dan Pencalegan Kader (TPPK), yang bertugas menjaring nama-nama kader yang pantas untuk maju menjadi bakal caleg dan terus menjadi caleg. TPPK PKS terdiri dari pimpinan struktural PKS, dimana struktural TPPK Provinsi terdiri dari Ketua DPW, Ketua DSW, Ketua MPW, Sekum DPW, Bendum DPW, Ketua Kaderisasi dan Ketua Bapilu. Dalam TPPK ini tidak ada perempuan satuorang pun, baik di struktur pusat hingga daerah. Selain itu keberadaan perempuan dalam kepemimpinan DPW PKS Sumbar, hanya terdapat dalam bidang Kewanitaan.

PKS memiliki pemahaman bahwa perempuan tidak seharusnya duduk sebagai pemimpin, sebagaimana terdapat dalam surat

An-nisa ayat 34 “*laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*”. Di struktural PKS, baik di tingkat DPD, DPW maupu DPP, perempuan tidak ada pada posisi pucuk pimpinan mana pun, kecuali pada bidang atau Departemen Kewanitaan itu sendiri.

b) Kriteria Penetapan Bakal Caleg di DPW PKS

Dalam menetapkan bakal caleg, TPPK DPW PKS Sumbar memiliki ukuran dan nilai sendiri waktu menyeleksi nama-nama yang telah masuk pada TPPK DPW, beberapa aspek atau kriteria yang dilihat:

1. Komitmen keagamaan dan pada partai.
2. Kontribusi terhadap partai
3. Aspek pendidikan.
4. Potensi Moral.
5. Keharmonisan keluarga

Alan Ware mengukur tentang batas seleksi terjadi di dalam satu kekuasaan partai yang terpusat

ataukah disentralisasikan kepada unit-unit lokal. Di dalam PKS penilaian terhadap aspek-aspek ini dilakukan oleh 7 orang anggota TPPK DPW PKS tersebut adalah penentuan secara khusus dan tidak tertulis, karena kriteria ini merupakan kriteria bakal caleg secara internal, PKS memiliki kriteria dalam penetapan bakal caleg, yaitu:

1. Memiliki kedekatan dengan masyarakat
2. Aktif berorganisasi
3. Memiliki basis massa
4. Memiliki citra positif

c) Pemilu Internal PKS

Pemilu internal di mulai dari kelompok-kelompok Binaan atau tarbiyah atau kelompok Ligo’ masing-masing, dimana masing-masing anggota mencalonkan 1 nama sebagai bakal calon anggota DPR RI, 1 nama bakal calon anggota DPRD

Provinsi dan nama bakal calon anggota DPRD Kota/ Kabupaten. Setelah itu nama-nama tersebut di kumpul dan divoting dalam kelompok tersebut. satu nama pada masing-masing tingkatan pemilihan akan ditulis dan dilaporkan pada pengurus.

Data yang telah masuk pada masing-masing tingkatan struktural, baik yang di DPP, DPW maupun DPD Kabupaten/Kota kemudian di rengking berdasarkan jumlah dukungan kelompok binaan dan setelah direngking, baru kemudian di syuro kan atau di musyawarahkan oleh TPPK.

Pada rekrutmen DPW PKS Sumbar, semua kader mengetahui adanya Pemilu internal dan ikut menjadi pemilih melalui kelompok-kelompok binaan, sebelum penetapan caleg dan nomor urut dilakukan oleh TPPK, namun tidak mengetahui

proses awal hingga akhirnya putusan akhirnya secara lengkap, sebagian hanya mengetahui proses awalnya saja.

Pada proses akhir ini, kader perempuan sering mengalami kekalahan, dimana peranan strategis partai memang selalu di berikan pada laki-laki, sehingga nama-nama kader perempuan PKS memang tidak banyak menonjol, baik itu di Pusat, Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Suami Istri yang menjadi caleg pada Pemilu 2004, memang terbilang cukup banyak, sebagian suami yang menjadi caleg, istrinya juga menjadi caleg di Dapil atau tingkatan yang berbeda.

2. Kebijakan Terhadap Bakal Caleg Incumbent di DPW PKS

Permasalahan incumbent, DPW PKS Sumbar memiliki pertimbangan sendiri, dimana marena terpaksa tidak kembali memprioritaskan

mereka pada nomor jadi, bahkan tidak mencalonkan mereka kembali pada Pemilu 2004. Pada Pemilu 1999, yang menjadi Anggota DPRD Sumbar dari PKS (dahulunya adalah Partai Keadilan) adalah Bapak Muhammad Yasin dan Bapak Marfendi, namun karena terlibat kasus korupsi terhadap anggaran APBD, sehingga tidak diprioritaskan. Pengambil keputusan tertinggi untuk pencalegan dilakukan oleh TPPK DPW PKS Sumbar, yang notabane nya adalah pimpinan struktural DPW PKS Sumbar dan semuanya berjenis kelamin laki-laki.

B. REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN OLEH DPW PBB SUMBAR PADA PEMILU 2004

1. Perekrutan Bakal Calon Legislatif

PBB

- a) Komite Aksi Pemenangan Pemilihan Umum (KAPPU) PBB

Partai Bulan Bintang dalam melakukan proses rekrutmen, terlebih dahulu membentuk sebuah Tim pemenangan yang tersusun dari pusat hingga daerah, tim tersebut bernama Komite Aksi Pemenangan Pemilihan Umum (KAPPU).

Di dalam PBB, keberadaan KAPPU sebagai badan pemenangan sangatlah strategis, karena memiliki kekuasaan dalam memutuskan siapa saja yang layak dan pantas untuk menjadi caleg Partai Bulan Bintang, khususnya dalam penentuan nomor urut. Pengurus KAPPU Sumbar ditentukan oleh Ketua DPW PBB Sumbar, yaitu Bapak Saidal Bahauddin, dimana dalam melakukan seleksi terhadap bakal caleg, KAPPU DPW PBB Sumbar terlebih dulu melakukan seleksi secara internal dan secara eksternal.

KAPPU melakukan penghitungan dengan menggunakan

sebuah standar ukur yang baku, dimana bakal caleg terlebih dahulu diseleksi berdasarkan poin-poin, semua kriteria diberi nilai tertentu untuk mengurangi subjektivitas. Kriteria tersebut menyangkut pendidikan (intelektualitas), posisi di dalam struktur Partai, keaktifan, pengalaman organisasi, moral, integritas dan loyalitas yang diberi nilai atau poin tertentu serta dapat dibuktikan. Semua bakal caleg mendaftarkan dan menyerahkan dalam waktu tertentu.

b) Permasalahan Dalam Perekrutan Calon Legislatif

Sistem rekrutmen yang dibangun oleh PBB termasuk menggambarkan PBB sebagai partai terbuka dan demokratis namun sayangnya penentuan poin hanya dilakukan oleh Tim KAPPU dan dilakukan secara tertutup. Hampir semua anggota KAPPU menjadi caleg dengan

nomor urut jadi, yaitu 1 atau 2. Selain itu, KAPPU pun sebagai lembaga yang melakukan verifikasi terhadap bakal caleg tidak mengumumkan secara terbuka tentang hasil verifikasi tersebut kepada semua kader internal maupun eksternal.

2. Kebijakan Terhadap Bakal Caleg Incumbent di DPW PBB

Pada periode 1999-2004

terdapat 4 orang Anggota DPRD Sumbar dari PBB. sehingga mereka diprioritaskan kembali untuk maju sebagai calon anggota legislatif, namun dalam tingkatan yang berbeda. Ketua DPW PBB yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada periode 2000-2005 tidak maju kembali untuk DPRD Sumbar, namun maju menjadi caleg DPR RI. Satu-satunya incumben yang kembali di calonkan sebagai caleg ke DPRD Sumbar adalah Bapak Hilman Syarifuddin.

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh PBB termasuk sangat terukur dan jelas dengan penggunaan bobot atau poin pada setiap jabatan atau prestasi kader, dan bahkan memberikan ruang yang hampir sama antara bakal caleg internal dan eksternal. Rekrutmen ini dilakukan oleh Tim KAPPU Sumbar yang merupakan tim khusus yang ditunjuk oleh Ketua DPW PBB Sumbar untuk melakukan rekrutmen. Namun pada akhirnya, hasil penjumlahan bobot masing-masing bakal caleg tersebut tidak terbuka dilakukan oleh KAPPU, hal ini juga melahirkan kecurigaan bakal caleg, karena pada akhir proses seleksi, mereka hanya mengetahui posisi nomor urutnya. Hal lainnya adalah perempuan yang menjadi bakal caleg DPW PBB Sumbar dengan nomor urut 1 pada Pemilu 2004, secara obyektif pun memang memiliki keunggulan lebih,

baik secara akademis maupun secara organisasi.

KESIMPULAN

Kalau dari pembagian Jenis partai politik berdasarkan komitmen terhadap ideologi dan kepentingannya, maka PKS dan PBB dapat diklasifikasikan, termasuk dalam partai massa, karena sama-sama memiliki ideologi partai yang jelas, yaitu Islam. Kedua partai ini membangun basis yang kuat, terkhususnya PKS, dimana memiliki struktural hingga tingkat kelurahan.

Rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PKS Sumbar memang dilakukan dengan melalui tahapan yang demokratis, yaitu bakal caleg diajukan melalui Pemilu internal. Namun tahapan ini hanya memperkuat dominasi laki-laki dalam proses rekrutmen, karena nama yang cenderung keluar dari setiap kelompok Ligo' adalah nama-

nama yang sudah populer dikalangan kader, dan hampir semuanya adalah laki-laki, sehingga proses ini agak merugikan kader perempuan. Pola patron-klien dan nepotisme dalam perekrutan mempengaruhi proses dan hasil rekrutmen bakal caleg DPRD Sumbar pada Pemilu 2004. Pengambil keputusan tertinggi untuk pencalegan dilakukan oleh TPPK DPW PKS Sumbar, yang notabene nya adalah pimpinan struktural DPW PKS Sumbar dan semuanya berjenis kelamin laki-laki.

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh PBB termasuk sangat terukur dan jelas dengan penggunaan bobot atau poin pada setiap jabatan atau prestasi kader, dan bahkan memberikan ruang yang hampir sama antara bakal caleg internal dan eksternal. Rekrutmen ini dilakukan oleh Tim KAPPU Sumbar. Namun pada

akhirnya, hasil penjumlahan bobot masing-masing bakal caleg tersebut tidak terbuka dilakukan oleh KAPPU, hal ini juga melahirkan kecurigaan bakal caleg, karena pada akhir proses seleksi, mereka hanya mengetahui posisi nomor urutnya.

Dalam proses rekrutmen, DPW PBB Sumbar dan tim KAPPU Sumbar secara tidak langsung menggunakan pola klik dalam rekrutmen caleg, dimana faktor kedekatan karena berasal dari OKP yang sama juga mempengaruhi hasil, selain juga upaya anggota Tim KAPPU sendiri untuk menyelamatkan dirinya sebagai caleg.

Rekrutmen bakal caleg DPW PKS dan DPW PBB Sumbar memiliki aturan yang jelas, namun PKS pada akhir seleksinya tetap ditentukan oleh sekelompok kecil

pemegang kekuasaan, walaupun pada awalnya memberikan kesempatan dari kelompok terkecil untuk mengajukan bakal calon. Sedangkan PBB pada akhirnya ditentukan oleh jumlah poin yang terkumpul dari semua persyaratan seleksi. Namun ketika terjadi permasalahan, keputusan tertinggi diserahkan pada Ketua DPW PBB Sumbar.

Jika dibandingkan antara pola rekrutmen yang dilakukan DPW PKS dengan DPW PBB, maka pola rekrutmen yang lebih terbuka dan adil adalah pola yang dilakukan oleh DPW PBB, karena pembobotan dilakukan berdasarkan pendidikan, prestasi dan loyalitas terhadap partai sehingga dapat diukur secara jelas. Sedang DPW PKS pada akhirnya ditentukan oleh Syuro yang semuanya adalah laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam (1996). *Demokrasi di Indonesia : Demokrasi*

Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta : Gramedia Pustaka.

Bungin, Burhan, dkk (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Eko, Sutoro. *Membuat Rekrutmen Legislatif Lebih Bermakna*. www.suarakomunitas_combine.or.id:

Fakih Mansour (1996). *Analisis Gender dan Transpormasi Sosial*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Febriani (2011). *Pola Rekrutmen Caleg Perempuan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Periode 2009-2004 Kabupaten Pesisir Selatan*. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.

Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Kencana Dwi Sarana Sajati.

Khausar AS (2009) *Sistem Birokrasi Pemerintahan di Daerah dalam Bayang-bayang Budaya patron-klien*.

Matland, Richard E. *Meningkatkan partisipasi politik perempuan: Rekrutmen legislatif dan sistem pemilihan*. www.idea.com

Rush, Michael, Phillip Althoff (1995). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sihite, Romany (2007). *Perempuan, kesetaraan, keadilan: Suatu tinjauan berwawasan gender*. Jakarta: Rajagrafindo persada

Siregar, Aliman (2003). *Rekrutmen Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum: Studi tiga OPP dalam Pemilihan Umum 1999 di Riau*. Disertasi. Depok: Bidang Studi Ilmu Politik Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Surbakti, Ramlan (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia

Ware, Alan (1996) "Political Parties and Party System". Oxford: Oxford University Press.